

KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA ERA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN LUWU UTARA

The Study of Forestry Contribution to the Local Government Revenue in Regional Autonomy Era at North Luwu Regency

A. Mujetahid, M.

Abstract

This research aims to identify the contribution of forestry sector to the Local Government Revenue at the regency of North Luwu in regional autonomy era. The research result is expected to provide inputs for evaluating and compiling Regional Budget and Expenditure Plan. The result is also intended to be used for evaluating the forest product retribution policy. This research was carried out in North Luwu Regency. Data were collected purposively by conducting observation technique/survey, interviews and discussions with related stakeholders. The data were then processed, tabulated and classified based on the aim of the research, and were analyzed descriptively. The results show that the contribution of forestry sector to the local government revenue of North Luwu Regency in average was 25,74% of PAD in total during 2000-2002.

Keyword : *contribution, forestry sector, PAD, regional autonomy.*

PENDAHULUAN

Sejalan dengan semangat otonomi daerah, Pemerintah Daerah berusaha memacu pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor di wilayahnya termasuk di dalam sektor kehutanan. Mengacu kepada Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, maka pemerintah daerah tidak saja berhak mengelola sumberdaya hutan di wilayahnya, namun juga harus bertanggung jawab memelihara kelestarian sumberdaya tersebut.

Kondisi awal dari perjalanan otonomi daerah ini, menunjukkan bahwa ternyata berbagai persoalan yang ada menyangkut upaya sebagian Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD. Situasi ini menimbulkan tekanan bagi Pemerintah Daerah untuk

menghasilkan tambahan pendapatan dengan mengenakan pajak dan retribusi baru. Salah satu sektor yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap PAD adalah sektor kehutanan, karena berdasarkan Peta Paduserasi tahun 1999 Kabupaten Luwu Utara memiliki kawasan hutan yang terluas dibanding kabupaten/kota lainnya di Propinsi Sulawesi Selatan yaitu 1.325.046 ha atau 25,68% dari luas kawasan hutan Propinsi Sulawesi Selatan. Dengan otonomi daerah, pengelolaan sumberdaya hutan diharapkan lebih demokratis dan hasilnya langsung dapat dinikmati oleh daerah secara lebih merata. Namun di sisi lain ada pihak yang mengkhawatirkan jika otonomi daerah dipahami sekedar kesempatan sebesar-besarnya bagi daerah untuk mengeksploitasi sumberdaya hutan guna meningkatkan PAD. Jika kondisi demikian benar-benar terjadi maka kelestarian sumberdaya hutan akan sulit diwujudkan.

Menurut Syaukani (2000), otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti hukum atau peraturan. Karena itu, otonomi menitikberatkan pada aspirasi masyarakat setempat daripada kondisi. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi adalah kebebasan dalam arti seluas-luasnya, sebebas-bebasnya dalam penetapan kebijakan publik, sehingga belum memikirkan kebutuhan, kepentingan ataupun keterikatan dengan daerah lain, bahkan keterikatan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fatah, 2002). Lebih lanjut disebutkan, bahwa makna desentralisasi dan otonomi daerah di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan apa yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974. Dari pengertian hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Muchsan (1999) yang dikutip Wiyono dan Awang (2001) menyebutkan bahwa sendi-sendi otonomi daerah meliputi: pembagian kewenangan, pembagian pendapatan dan pemberdayaan masyarakat serta kemandirian administrasi Pemerintah Daerah.

Aswin (2002), mengemukakan bahwa pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten sedang

dalam proses belajar melaksanakan kebijakan otonomi daerah dalam kerangka desentralisasi pengelolaan sumberdaya hutan. Oleh karena itu pemerintah propinsi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait dengan kewenangan, dengan selalu melihat dan memperhatikan peraturan yang lebih tinggi. Adapun pemerintah kabupaten cenderung mencari celah yang ada dalam kaitan dengan hak dan kewenangan serta tidak selalu taat pada nuansa yuridis.

Alrasyid (2002) mengemukakan bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan yang demokratis dan berkeadilan serta memihak secara ikhlas kepada kepentingan masyarakat, maka penyelenggaraan otonomi daerah dalam pengelolaan hutan merupakan suatu kebutuhan. Penyelenggaraan pengelolaan hutan pada era otonomi daerah harus mengedepankan prinsip-prinsip dan kriteria pengelolaan hutan lestari tanpa tersekat ke dalam batas-batas wilayah administrasi. Pengelolaan hutan oleh kabupaten cenderung hanya menekankan kepada penerimaan, tetapi belum mengatur mengenai rehabilitasi, pemeliharaan dan konservasi hutan.

Pendapatan daerah diartikan sebagai penerimaan suatu negara yang bersumber dari pajak, retribusi dan sumber pendapatan lainnya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk membiayai kepentingan daerah yang bersangkutan (Lappy, 2001). Selanjutnya disebutkan bahwa umumnya PAD Indonesia terbagi atas: (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) Laba Badan Usaha Milik Daerah; (4) pemberian dinas-dinas daerah; (5) penerimaan lain-lain; (6) pinjaman daerah dan (7) penghasilan lain-lain yang sah.

Menurut Simanjuntak (2001), peranan PAD dalam struktur penerimaan daerah yaitu berkisar antara 10-30%. Lebih lanjut dikatakan bahwa Pemerintah Daerah selalu

berupaya keras meningkatkan PAD, hal ini tercermin dari berbagai pungutan Pemerintah Daerah yang merebak di beberapa tempat. Ada yang merupakan pungutan lama yang pernah dihapus dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi, dan tidak sedikit pula pungutan-pungutan baru. Sebelum Otonomi, hampir 90% penerimaan daerah berupa transfer dari Pemerintah Pusat dan subsidi dalam bentuk Inpres atau untuk membayar gaji pegawai. Pada waktu itu, kebebasan Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan keuangannya sangat terbatas. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi sektor kehutanan terhadap PAD di Kabupaten Luwu Utara di era otonomi daerah dan untuk mengetahui jenis-jenis pungutan yang memberikan kontribusi terhadap PAD di era otonomi daerah serta upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD sektor kehutanan. Hasil yang diharapkan sebagai keluaran dari penelitian ini adalah tersedianya data dan informasi tentang besarnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PAD Kabupaten Luwu Utara, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam

mengevaluasi dan menyusun Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan bahan evaluasi kebijakan sistem pemungutan pajak dan retribusi hasil hutan.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2003 di Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan. Lokasi tersebut dipilih karena berdasarkan Peta Paduserasi tahun 1999 Kabupaten Luwu Utara memiliki kawasan hutan yang terluas dibanding kabupaten/kota lainnya di Propinsi Sulawesi Selatan yaitu 1.325.046 ha (25,68%) dari luas kawasan hutan Propinsi Sulawesi Selatan.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi/survei, wawancara dan diskusi dengan stakeholder yang ada kaitannya dengan penelitian ini (*purposive sampling*). Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah, ditabulasi dan diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan formula sebagai berikut:

- a.
$$\frac{\text{Realisasi penerimaan sektor kehutanan}}{\text{Target penerimaan sektor kehutanan}} \times 100\%$$
- b.
$$\frac{\text{Total penerimaan sektor kehutanan}}{\text{Total realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$
- c.
$$\frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$$
- d. Penerimaan PSDH Kabupaten Luwu Utara = 32% x Jumlah setoran
- e. Penerimaan IHH (Iuran Hasil Hutan) Kabupaten Luwu Utara
= 64% x Jumlah setoran
- f. Penerimaan DR (Dana Reboisasi) Kabupaten Luwu Utara
= 40% x Jumlah setoran
- g. Kayu olahan :
- 1) Kayu dalam daerah = Jumlah produksi x 10% harga kayu
 - 2) Kayu keluar daerah = Jumlah produksi x 25% harga kayu
- h. Kayu bulat = Jumlah produksi (m³) x Rp 20.000/m³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam rentang waktu yang masih sangat mudah, otonomi daerah dihadapkan berbagai tantangan yang cukup berat. Salah satunya adalah bagaimana kemampuan daerah dalam mempersiapkan berbagai infrastruktur pembangunan daerah,

sehingga daerah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara meningkatkan penerimaan dari PAD. Otonomi daerah ini dilihat dari segi penerimaan, memberikan implikasi positif bagi peningkatan penerimaan PAD Kabupaten Luwu Utara. Data produksi kayu bulat, rotan dan kayu olahan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Produksi Kayu Bulat Kabupaten Luwu Utara

Tahun	Jenis Kayu				Non Kayu (Rotan)
	Kayu Rimba Campuran (m ³)	Kayu Meranti (m ³)	Kayu Agatis (m ³)	Jumlah (m ³)	
2000	7.309,81	1.102,87	441,58	8.584,26	-
2001	5.524,76	1.083,99	552,98	7.161,73	1.481,067
2002	498,76	340,66	239,81	1.079,23	1.745,333

Sumber. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara, 2003

Tabel 2. Produksi Kayu Olahan Kabupaten Luwu Utara

Tahun	Produksi Kayu Olahan (Kayu Rimba Campuran/Gergajian)		Jumlah
	Kayu Dalam Daerah	Kayu Keluar Daerah	
2000	5.812,44	1.162,49	6.974,92
2001	7.500,23	1.022,81	8.528,04
2002	2.658,55	348,52	3.007,07

Sumber. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara, 2003

Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa produksi kayu bulat dan kayu olahan dari tahun 2000 sampai tahun 2002 menurun, ini disebabkan karena potensi kayu

rimba semakin berkurang yang ditandai dengan semakin berkurangnya pengusaha kayu. Sedangkan produksi kayu bulat dan olahan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Produksi Kayu Bulat dan Olahan Kabupaten Luwu Utara.

Tahun	Produksi Kayu			
	Bulat/log (m ³)	Olahan (m ³)		
		Dalam Daerah	Luar Daerah	Jumlah
2000	8.584,26	5.812,44	1.162,49	6.974,93
2001	7.161,73	7.500,23	1.027,81	8.528,04
2002	1.079,23	2.658,55	348,52	3.007,07

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara, 2003

Berpedoman pada (1) Perda No. 8 Tahun 2000 tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga yang dituangkan dalam keputusan Bupati No. 66 tentang petunjuk teknis pengelolaan sumbangan pihak ketiga Kabupaten Luwu Utara, bahwa retribusi kayu log/bulat sebesar Rp 20.000/m³, (2) Surat edaran Bupati Luwu Utara No. 954/139/DIP/2000 perihal retribusi pasar grosir kayu olahan diberlakukan tarif sesuai yang tercantum dalam peraturan Daerah

Kabupaten Luwu Utara No. 23 Tahun 2000 tentang retribusi pasar grosir sebesar :

- Kayu dalam daerah = Rp 400.000/m³. (harga standar) x 10%
- Kayu keluar daerah = Rp 800.000/m³. (harga standar) x 25%

(3) Perda No. 23 Tahun 2000 tentang retribusi pasar grosir dan pertokoan bahwa retribusi untuk hasil hutan non kayu (rotan) sebesar Rp 15.000/ton.

Tabel 4. Kontribusi Sektor Kehutanan Kabupaten Luwu Utara

Tahun	Kontribusi Sektor Kehutanan			
	Kayu Bulat/log (Rp)	Kayu Olahan (Rp)		
		Dalam Daerah	Luar Daerah	Jumlah
2000	171.685.200	232.497.400	232.497.400	464.994.800
2001	143.234.600	525.016.315	308.342.915	833.359.230
2002	21.584.600	345.611.280	148.119.120	493.730.400

Sumber. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara

Tabel 4 menunjukkan bahwa kontribusi sektor kehutanan pada tahun 2000 untuk jenis kayu bulat/log sebesar Rp 171.685.200 dengan produksi kayu bulat sebanyak 8.584,26 m³, sedangkan jenis kayu olahan terdiri dari kayu yang

dimanfaatkan dalam wilayah Luwu Utara sebesar Rp 232.497.400 dengan produksi sebanyak 5.812,435 m³ dan kayu yang dimanfaatkan di luar wilayah Luwu Utara sebesar Rp 232.497.400 dengan jumlah produksi sebanyak 1.162,487 m³.

Pada tahun 2001, kontribusi sektor kehutanan untuk jenis kayu bulat/log sebesar Rp 143.234.600 dengan jumlah produksi sebanyak 7.161,77 m³, sedangkan kontribusi jenis kayu olahan yang terdiri dari kayu yang dimanfaatkan dalam wilayah Luwu Utara sebesar Rp 525.016.315 dengan jumlah produksi sebanyak 7.500,23 m³ dan kayu yang

dimanfaatkan di luar Kabupaten sebesar Rp 308.342.915 dari produksi 1.027,81 m³. Kontribusi rotan sebesar Rp 22.216.005 dari produksi 1.481,067 ton. Pada tahun 2002 untuk jenis kayu bulat/log memberikan kontribusi sebesar Rp 21.584.600 dengan jumlah produksi 1.879,23 m³. Sedangkan kontribusi jenis kayu olahan yang dimanfaatkan dalam daerah sendiri sebesar Rp 345.611.280 dengan jumlah produksi 2.658,55 m³ dan kayu keluar daerah sebesar Rp 148.119.120 dari produksi 348,52 m³.

Dengan demikian secara keseluruhan kontribusi hasil hutan kayu, baik kayu bulat maupun olahan pada tahun 2000 sebesar Rp 464.994.800 dan meningkat sebesar 79,22% menjadi Rp 833.359.230 pada tahun 2001. Sedangkan pada tahun 2002 menjadi Rp 493.730.400 atau mengalami penurunan sebesar 49,20%.

Tabel 5. Penerimaan Dana Reboisasi

Tahun	Penyerahan ke Pusat	Pengembalian ke Daerah 40%	Yang diperoleh oleh Pusat 60%
2001	Rp 741.714.000	Rp 296.685.600	Rp 445.028.400
2002	US\$ 163.883,67	US\$ 65.553,468	US\$ 98.330,202

Sumber. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara. 2003

Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa penerimaan Dana Reboisasi di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2001 sebesar Rp 296.685.600, yang diperoleh dari penyeteroran bagi hasil penerimaan dana reboisasi dengan pusat yang mengacu kepada pasal 8 Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan

antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa dana reboisasi dibagi dengan imbalan 40% kepada daerah penghasil dalam bentuk dana alokasi khusus dan 60% untuk pemerintah pusat. Sedangkan pada tahun 2002 diperoleh penerimaan daerah sebesar US\$ 163.883,67, dan

yang diserahkan ke pusat sebesar US\$ 98.330,202 atau 60%.

Penerimaan Dana Provisi Sumber Daya Hutan diatur melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, disebutkan pada pasal 6 ayat 5 bahwa

80% dari penerimaan provisi sumber daya hutan dibagi dengan rincian pemerintah propinsi sebesar 16%, Kabupaten/kota penghasil sebesar 32% dan kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan sebesar 32% sedangkan 20% penerimaan pusat.

Tabel 6. Kontribusi Sektor Kehutanan dari Penerimaan Dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Thn	Penyetoran	Penerimaan PSDH			
		Pusat 20%	Propinsi 16%	Kota Penghasil 32%	Kota Lain dalam Propinsi 32%
2000	286.783.198	57.356.639,6	45.885.311,68	91.770.623,36	91.770.623,36
2001	629.739.583	125.947.916,6	100.758.333,3	201.516.666,6	201.516.666,6
2002	637.473.132	127.499.626,4	101.995.701,1	203.991.402,2	203.991.402,2

Sumber. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara. 2003

Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa penerimaan sektor kehutanan dari Dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tahun 2000 sampai 2002 mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 meningkat sebesar 119,59% dari Rp 91.770.623,36

menjadi Rp 201.516.666,6 dan tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar 1,23% menjadi Rp 203.991.402,2. Sedangkan penerimaan IHH disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Penerimaan Iuran Hasil Hutan (IHH)

Tahun	Iuran Hasil Hutan			
	Penyetoran	Pusat 20%	Propinsi 16%	Daerah Penghasil 64%
2000	286.783.198	57.356.639,6	45.885.311,68	183.541.246,7
2001	45.354.402	9.070.880,4	7.256.704,32	29.026.817,28

Sumber. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara. 2003

Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa penerimaan Iuran Hasil Hutan Kabupaten Luwu Utara mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena perusahaan-perusahaan kayu berupa HPH sejak tahun 2001 tidak mendapatkan ijin perpanjangan.

Penerimaan Iuran Hasil Hutan dibagi dengan perincian 20% untuk pusat, 16% propinsi dan 64% kabupaten/kota penghasil. Dengan demikian kontribusi sektor kehutanan terhadap PAD dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PAD Kabupaten Luwu Utara

Tahun	Penerimaan Bidang Kehutanan				Total PAD	%
	Kayu	Rotan	Hasil Lelang	Jumlah		
2000	636.680.000	-	-	636.680.000	3.065.045.120	20,77
2001	976.593.830	22.216.000	16.756.220	1.015.566.050	3.594.024.835	33,19
2002	515.315.000	26.180.000	-	541.495.000	1.863.037.960	29,06

Sumber. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara. 2003

Tabel 8 menunjukkan bahwa kontribusi sektor terhadap PAD Luwu Utara pada tahun 2000 sebesar Rp 636.680.000 (20,77%) dari total PAD sebesar Rp 3.065.045.120, tahun 2001 sebesar Rp 1.015.566.050 (33,19%) dari total PAD sebesar Rp 3.594.024.835 dan pada tahun 2002 terealisasi sebesar

Rp 541.495.000 (29,06%) dari total PAD sebesar Rp 1.863.037.960. Dengan demikian rata-rata kontribusi sektor kehutanan terhadap PAD selama tiga tahun (2000-2002) sebesar Rp 731.247.017 (25,74%) dari total PAD rata-rata sebesar Rp 2.840.702.638

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang Berkaitan dengan Peningkatan PAD Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pilihan-pilihan daerah otonom dapat dilaksanakan pada daerah propinsi dan kabupaten. Dari sekian banyak wewenang yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten dan propinsi adalah kewenangan terhadap pengelolaan sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 10 ayat 1),

walaupun dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 22 tahun 1999 disebutkan pemerintah (pusat) masih memiliki kewenangan tentang pendayagunaan sumberdaya alam yang strategis.

Sebagai wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk menambah sumber pendapatan khususnya bidang kehutanan.

Perda Kabupaten Luwu Utara No. 23 Tahun 2000, tentang Retribusi pasar grosir dan pertokoan. Perda ini oleh Pemerintah Daerah Luwu Utara dijadikan untuk menentukan besarnya tarif retribusi yang harus dibayarkan oleh perorangan maupun badan usaha. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah ini menjelaskan tentang penggolongan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pada PP ini selain menjelaskan tentang golongan retribusi juga memaparkan tentang rincian dan jenis-jenis retribusi. Selain jenis retribusi yang ditetapkan dalam PP ini, dengan Perda dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya sesuai kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang.

Perda No. 53 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai

daerah otonom dan Perda No. 05 tahun 2001 tentang Perijinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan, yang memuat tentang 19 jenis perizinan usaha kehutanan, sehingga masyarakat memiliki kesempatan berusaha yang lebih luas.

Perda No. 14 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara. Perda tersebut merupakan revisi terhadap Perda No. 14 tahun 2001. Revisi penting yang tercantum pada Perda No. 14 tahun 2000 adalah adanya seksi perijinan pada struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara yang sebelumnya pada Perda No. 28 tahun 2000 tidak ada. Hal ini mengantisipasi pelimpahan wewenang Pemerintah Kabupaten dalam hal pengurusan perijinan usaha kehutanan.

Keputusan Bupati Luwu Utara No.80 tahun 2002, tentang jenis barang/komoditas dan penggunaan tarif pasar grosir di wilayah kabupaten Luwu Utara. Dalam keputusan ini dijelaskan jenis bahwa jenis rotan dikenakan tarif sebesar Rp 15.000,- / ton, sedangkan retribusi kayu log sebesar Rp 20.000/m³.

C. Strategi Pemda Kabupaten Luwu Utara untuk Meningkatkan PAD Sektor Kehutanan

Dalam rangka otonomi daerah muncul inisiatif yang kuat dari pemerintah daerah dan kalangan legislatif untuk melakukan pengaturan-pengaturan pengelolaan sumberdaya hutan yang ada di wilayahnya. Namun demikian apabila dilihat dari Perda-perda yang dikeluarkan, upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD sektor kehutanan adalah dengan cara memperbanyak jenis pungutan atas produksi hasil hutan, selain DR dan PSDH, serta peningkatan jenis dan besarnya tarif. Disamping itu upaya yang dilakukan adalah

memperbanyak pemberian ijin penertiban peredaran hasil hutan dan lain-lain.

Saat ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Luwu Utara telah mengeluarkan ijin usaha dengan persetujuan Bupati sebanyak 13 izin usaha yang terdiri dari 10 ijin PHPHH (Perijinan Hak Pemungutan Hasil Hutan), 2 ijin PPCTM (Perijinan Pemanfaatan Kayu Tanah Milik) dan 1 ijin PPK (Perijinan Pemanfaatan Kayu). Sementara ijin usaha yang saat ini sedang diproses maupun yang baru mengajukan permohonan, terdiri dari 3 ijin PPCTM (Perijinan Pemanfaatan kayu Tanah Milik), 11 ijin PPK (Perijinan Pemanfaatan Kayu), 6 ijin PUP (Perijinan Usaha Perkebunan), 7 ijin PHKM (Perijinan Hutan Kemasyarakatan), 2 ijin PHPH (Perijinan Hak Pengusahaan Hutan), 3 ijin P3KE (Perijinan Pemanfaatan dan Pengangkutan Kayu Ebony), 10 ijin PHPHH (Perijinan Hak Pemungutan Hasil Hutan), dan 1 ijin PWA (Perijinan Wisata Alam). Bentuk badan usaha yang mengajukan permohonan tersebut berupa CV, PT, UD, dan koperasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sektor kehutanan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD rata-rata 25,74% per tahun.
2. Strategi Pemda Luwu Utara untuk meningkatkan PAD dengan cara memperbanyak jenis pungutan, meningkatkan tarif, memperbanyak pemberian ijin dan penertiban peredaran hasil hutan.
3. Dalam upaya peningkatan PAD sektor kehutanan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara perlu mempertimbangkan sumber-

sumber PAD selain kayu dan rotan seperti pemanfaatan jasa lingkungan, taman-taman wisata Atau tempat rekreasi, yang apabila dikelola secara profesional akan memberikan kontribusi terhadap PAD yang cukup besar dibandingkan hasil hutan kayu dan rotan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alrasyid, H. 2001. *Kondisi Faktual, Masalah dan Harapan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Menuju Pengelolaan Hutan Lestari*. Makalah disampaikan pada Lokakarya Optimalisasi Pelaksanaan Desentralisasi dan Sistem Pendukungnya di Sektor Kehutanan 3-4 Desember 2001 di Jakarta.
- Aswin. 2001. *Kondisi Faktual, Masalah dan Harapan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat Menuju Pengelolaan Hutan Lestari*. Makalah disampaikan pada Lokakarya Optimalisasi Pelaksanaan Desentralisasi dan Sistem Pendukungnya di Sektor Kehutanan 3-4 Desember 2001 di Jakarta.
- Departemen Kehutanan. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Kopkar Hutan. Jakarta.
- , 1999. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*.
- , 1999. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta
- , 2000. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom*. Jakarta
- Fatah, S. A. 2001. *Kondisi Faktual, Masalah dan Harapan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Menuju Pengelolaan Hutan Lestari*. Makalah disampaikan pada Lokakarya Optimalisasi Pelaksanaan Desentralisasi dan Sistem Pendukungnya di Sektor Kehutanan 3-4 Desember 2001 di Jakarta.
- Lappy, M. 2001. *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pemberian Otonomi Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Simanjuntak, R.A. 2001. *Melaksanakan Otonomi Tidak Mudah. Wacana Alumni Diklat LPEM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Volume II No.4 Oktober 2001*. LPEM-UI. Jakarta.
- Syaukani, 2000. *Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah. Gerbang Dayaku Offset and Printing*. Tenggarong.
- Wiyono dan S.A. Awang. 2001. *Konsep Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan dalam rangka Otonomi Daerah. Jurnal Hutan Rakyat V 262 III Nomor 3 Tahun 2001*. Pusat Kajian Hutan f Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Diterima 16 Juli 2007

A. Mujetahid, M.

Yayasan pengkajian dan Penegmabnagan kehutanan

(YP2K) Sulawesi Selatan

Telp. 0411.589447 Alamat : Kompleks Griya Alam Permai Ruko 2

HP : 0812415891